



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA
KOTA BATU**

RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
—● TAHUN ●—
2017 - 2022

disparta
KOTA BATU

Shining
Batu



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan bimbinganNya semata, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022 dapat kami selesaikan.

Adapun dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagai output dari Renstra Dinas Pariwisata akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, program-program untuk dilaksanakan secara berkesinambungan disetiap tahunnya, sehingga dapat dilihat hasil kegiatan dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Batu serta bersinergi dengan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dalam rencana pembangunan, sebagai upaya untuk memberikan informasi yang terpercaya dan akuntabel untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Batu.

Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2017-2022.

Batu, 31 Mei 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Strutur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan dan menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai pada masa 5 tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai dan menentukan kemana arah pelayanan OPD akan dikembangkan.

Rencana strategis (Renstra) OPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi OPD dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan; sifatnya garis besar, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Karena penyusunan dokumen rencana strategis OPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis OPD sesuai tupoksi OPD.

Rencana strategis OPD memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi OPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas OPD dalam implementasinya.

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan OPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh OPD.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan OPD.
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja OPD.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; telah mengeluarkan panduan berupa Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang dibangun dalam 6 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan Penyusunan
 - 1) pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD
 - 2) orientasi Renstra OPD
 - 3) penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Rensra
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal
 - 1) analisis gambaran pelayanan;
 - 2) analisis permasalahan;
 - 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) analisis isu strategis;
 - 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;

- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.
3. Tahap Penyusunan Rancangan
4. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir
6. Tahapan Penetapan

Tahapan Pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan untuk mengkomunikasikan rancangan Renstra serta memperoleh penajaman dan penyepakatan. Dalam kegiatan ini melibatkan Stakeholder pariwisata, yaitu Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI Kota Batu), pengelola obyek wisata, pengelola desa wisata, Dewan Kesenian Kota Batu, BAPTA, ASITA, HPI, untuk memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan bidang masing-masing.

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup kepariwisataan dalam sebuah daerah khususnya di Kota Batu, sehingga tidak mungkin urusan pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata sendiri, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian, ekonomi perdagangan, perijinan usaha, serta perhubungan. Maka dalam penyusunan Renstra ini, Dinas Pariwisata juga berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain Dinas PU Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi UKM dan Perindag, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanaman Modal Terpadu.

Terkait dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu mensinergikan berbagai substansi dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menjadi isu strategis yang sebagian ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan.

Disamping itu juga memperhatikan perundang-undangan kepariwisataan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta Peraturan Menteri Pariwisata terkait dengan Undang-Undang tersebut. Sehingga penyusunan Renstra ini tidak menyimpang dari RPJMD yang telah disusun dan Dinas Pariwisata membuat program yang akan dilaksanakan dengan tata urutan seperti yang ada pada susunan Renstra ini.

Pada RPJPD 2005-2025, dalam mendukung Mengembangkan Struktur Ekonomi Berdaya Saing Global, pengembangan pariwisata diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat, mengembangkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat serta mampu membawa dampak peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Sedangkan pengembangan kebudayaan diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon secara positif dan produktif terhadap modernisasi sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat guna Mewujudkan SDM yang Handal, Berakhlak Mulia dan Berbudaya.

Selanjutnya pada RPJPD Tahap Ketiga (2014–2019) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing

Terkait dengan RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022, Renstra Dinas Pariwisata sepenuhnya berpedoman pada dokumen perencanaan tersebut yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005–2025 serta visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018–2022. Renstra Dinas Pariwisata menindaklanjuti program-program dalam RPJMD dengan menetapkan berbagai kegiatan pembangunan. Semua indikator kinerja dalam RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata harus masuk dalam dokumen Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa Renstra Dinas Pariwisata mendukung berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait dengan Renja Dinas Pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pariwisata. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Dinas Pariwisata diuraikan dalam Renja Dinas Pariwisata.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030; dan
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2018 – 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu. Penjabaran tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan, sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 – 2022 yaitu “Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan”, dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD; landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD; dan uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dipaparkan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu dari hasil Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dan menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini berisikan uraian program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang akan dicapai, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu, tertuang pada Peraturan Walikota Batu No. 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu.

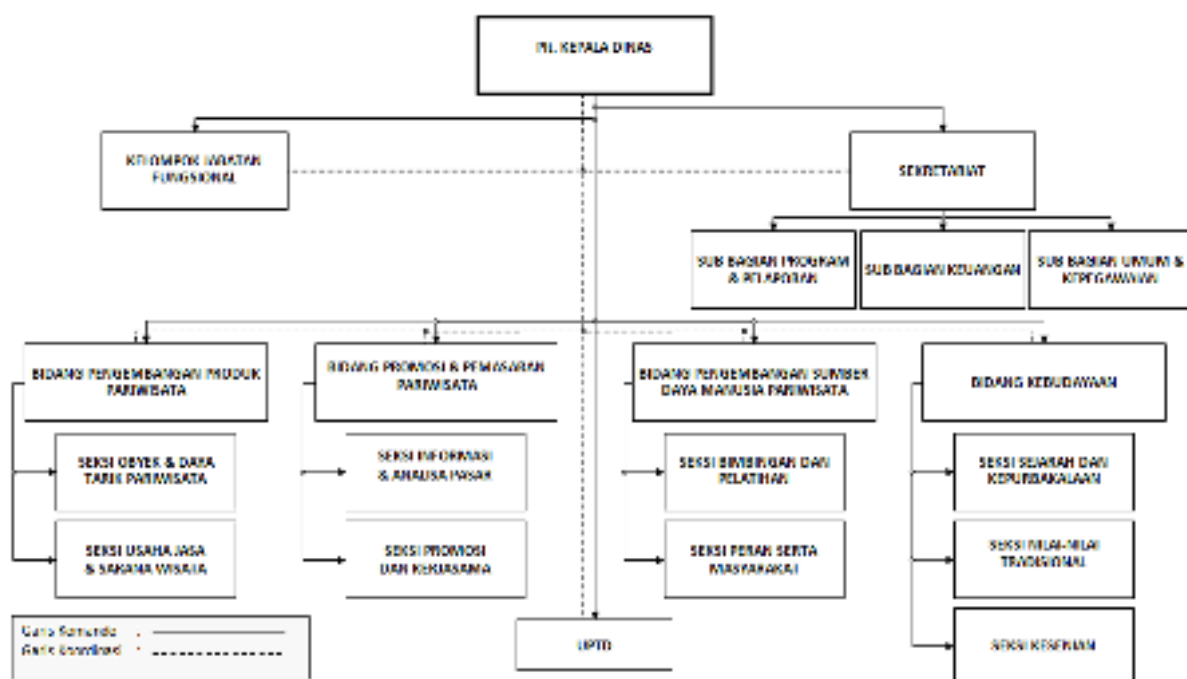
Struktur organisasi Dinas Pariwisata yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut tersusun atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Informasi dan Analisa Pasar
 - b. Seksi Promosi dan Kerja Sama
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan
 - b. Seksi Peran Serta Masyarakat
6. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b. Seksi Nilai-Nilai Tradisional
 - c. Seksi Kesenian
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan

atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu



Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dinas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. pengelolaan administrasi keuangan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata;
- d. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata;
- e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
- f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
- g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
- h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
- f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
- g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
- h. pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata;
- i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
- j. perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;

- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- h. penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang kebudayaan;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan;
- d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan;
- e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata didukung oleh 70 orang personil yang terdiri dari 63 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 7 lainnya adalah Tenaga Honorer Daerah.

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Kota Batu

Komponen	Keterangan	Jumlah	%
Jumlah Pegawai	L	42	60
	P	28	40
	Jumlah	70	100
Golongan/Ruang	IV/c	1	1
	IV/b	0	0
	IV/a	3	4
	III/d	8	11
	III/c	9	13
	III/b	10	14
	III/a	8	11
	II/d	6	9
	II/c	16	23
	II/b	2	3
	II/a	1	1
	I/c	1	1
	Honorar	7	10
Ijazah Terakhir	S2	8	11
	S1	26	37
	D4	0	0
	D3	11	16
	SMA	19	27
	SD	1	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2018

Pegawai Dinas Pariwisata Kondisi SDM aparatur Dinas Pariwisata menurut tingkat pendidikan sudah cukup memadai, kondisi ini ditunjukkan dengan sebagian besar aparatur Dinas Pariwisata berpendidikan tinggi.

2.2.2 Prasarana / Sarana

Sumber daya aset yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Batu disajikan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Tanah	Bidang	1
2	Peralatan & Mesin	Unit	735

No	Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah Barang
3	Gedung & Bangunan	Unit	25
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	Unit	4
5	Aset Tetap Lainnya	Unit	302
6	Kendaraan Roda 4	Unit	2
7	Kendaraan Roda 2	Unit	12
8	Alat Kantor	Buah	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata 2018

Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Gedung Utama (Kantor), berada di Block Office Batu Among Tani Gedung B Lantai II. Terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang Sekretaris, 4 ruang Kepala Bidang, dan 1 ruang Gudang. Untuk ruang utama dipisahkan oleh sekat dan terbagi menjadi area lobi, area sekretariat, area kepala seksi, staf, dan area tenaga pengelola data dan desain.
2. Gedung Kesenian Mbatu Aji, berada di Jl. Raya Oro-Oro Ombo No.9, Kec. Batu. Terdiri dari 2 gedung utama, 1 amphiteater, 5 kios untuk memasarkan karya seni, lapangan parkir, 2 bangunan dibelakang amphiteater untuk ruang ganti, 2 kamar mandi di bawah tribun amphiteater. Gedung sebelah utara terdiri dari 1 ruang untuk kantor Dewan Kesenian dan hall kesenian. Sedangkan gedung sebelah selatan terdiri dari hall kesenian dan ruang untuk penjaga gedung.
3. Area Landing Paralayang, berada di Kelurahan Songgokerto yang terdiri dari beberapa area :
 - a. Gedung area landing paralayang. Dengan luas bangunan 126 m², gedung yang dibangun sejak 2016 ini terdiri dari 1 ruang pengurus dan lapangan sebagai area landing Paralayang.
 - b. Jembatan ponton. Jembatan yang berfungsi sebagai penghubung jalan ke area landing paralayang ini dibangun pada 2010
 - c. Area Parkir. Dibangun pada tahun 2010
4. Area takeoff Paralayang, berada di Gunung Banyak. Terdiri dari mushola, toilet dan fasilitas pendukung lain.
5. Kampung Wisata Kungkuk, berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji terdiri dari :
 - a. Gapura Desa Wisata. Dibangun pada tahun 2010
 - b. Gazebo. Dibangun pada tahun 2011
 - c. Gudang, kamar mandi, dan area outbound. Dibangun pada tahun 2012

- d. Halaman parkir dan papan nama desa wisata. Pada tahun 2017 telah dilakukan pavingisasi pada halaman parkir dengan luas 352 m².
6. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada dalam kondisi baik dan memadai.
7. Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representatif.
8. Perangkat komputer dan komponen pendukung yang ada masih jauh dari cukup. Dengan jumlah pegawai sebanyak 70 orang, hanya tersedia 28 unit komputer dan laptop. 82 % diantaranya telah berusia lebih dari 8 tahun. Untuk printer hanya tersedia 12 unit dan 75% diantaranya telah berusia lebih dari 8 tahun. Sehingga perlu peremajaan komputer dan printer untuk meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Pariwisata.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Batu, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan pilihan pariwisata dan urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan.

Kewenangan Kota Batu dibidang pariwisata meliputi Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Produk Pariwisata, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, melalui Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata, Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Sedangkan kewenangan di bidang kebudayaan meliputi Sejarah dan Kepurbakalaan, Nilai-Nilai Tradisional, dan Kesenian melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Batu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan																			
1	Cakupan Kajian Seni (%)	v			53	53	53	53	53	33	33	33	40	20	0,62	0,62	0,62	0,75	0,38
2	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	v			43	43	43	43	43	43	43	43	57	43	1,00	1,00	1,00	1,33	1,00
3	Cakupan gelar seni (%)	v			75	75	75	75	75	75	100	100	75	100	1,00	1,33	1,33	1,00	1,33
4	Misi kesenian (%)	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	v			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Cakupan tempat kesenian	v			100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7	Cakupan organisasi kesenian	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		v		0	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		v		2	3	2	2	2	42	1	1	1	1	21,00	0,33	0,50	0,50	0,50
Urusan Pilihan Pariwisata																			
1	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)		v		2,70	2,86	3,03	3,22	3,41	3,29	3,36	3,72	3,97	4,79	1,22	1,18	1,22	1,23	1,40

Batu, 31 Mei 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

Tabel T-C.23.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Batu

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PILIHAN PARIWISATA	7.157.497.500	10.623.462.500	11.416.613.500	6.276.122.000	9.248.453.600	6.777.040.396	8.800.228.912	8.538.259.547	5.445.631.500	6.509.108.382	95	83	75	87	70	0,15	0,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.606.000	870.742.500	947.365.500	649.160.000	626.255.600	757.774.939	731.889.372	736.798.431	575.848.550	600.646.420	97	84	78	89	96	(0,04)	(0,05)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390.000.000	275.500.000	250.000.000	147.000.000	364.500.000	373.764.533	247.944.915	234.313.720	145.026.900	356.203.250	96	90	94	99	98	0,17	0,17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.850.000	-	42.748.000	-	20.000.000	23.075.000	-	36.535.000	-	19.800.000	93	-	85	-	99	(0,50)	(0,50)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	-	24.200.000	14.200.000	25.732.000	68.493.250	-	12.292.000	2.160.000	19.180.000	98	-	51	15	75	(0,15)	1,51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.811.500	-	5.000.000	-	14.250.000	17.453.000	-	5.000.000	-	-	59	-	100	-	-	(0,50)	(0,50)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.753.630.000	6.091.620.000	6.742.300.000	3.647.762.000	6.288.616.000	4.579.501.220	5.716.711.300	5.859.140.896	2.947.336.800	3.966.847.717	96	94	87	81	63	0,16	0,03
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	566.400.000	2.282.500.000	2.250.000.000	243.000.000	1.153.100.000	448.342.454	1.195.372.375	692.629.500	222.850.000	883.866.915	79	52	31	92	77	1,47	0,88
Program Pengembangan Kemitraan	542.200.000	1.103.100.000	1.070.000.000	1.575.000.000	756.000.000	508.636.000	908.310.950	961.550.000	1.552.409.250	662.564.080	94	82	90	99	88	0,24	0,22
Program Manajemen Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	-
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN	1.542.502.500	2.529.137.500	2.834.200.000	2.149.053.815	3.367.662.000	1.455.670.500	2.382.828.500	2.558.805.500	2.031.927.048	1.923.268.000	94	94	90	95	57	0,27	0,11
Program Pengembangan Nilai Budaya	65.650.000	130.650.000	746.000.000	100.000.000	200.000.000	65.400.000	128.800.000	681.072.500	92.390.000	169.050.000	100	99	91	92	85	1,46	1,31
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	521.642.500	815.487.500	243.000.000	415.000.000	948.810.000	446.565.500	739.737.500	147.030.000	402.501.000	168.470.000	86	91	61	97	18	0,46	0,25
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	855.210.000	1.483.000.000	1.724.200.000	1.484.053.815	2.218.852.000	843.755.000	1.414.291.000	1.612.551.000	1.399.701.048	1.435.748.000	99	95	94	94	65	0,31	0,18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	100.000.000	100.000.000	121.000.000	150.000.000	-	99.950.000	100.000.000	118.152.000	137.335.000	150.000.000	100	100	98	92	-	(0,14)	0,11
Total	8.700.000.000	13.152.600.000	14.250.813.500	8.425.175.815	12.616.115.600	8.232.710.896	11.183.057.412	11.097.065.047	7.477.558.548	8.432.376.382	95	85	78	89	67	0,17	0,04

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Propinsi

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata periode 2015-2019 yang ditetapkan melalui Permenpar No 29 Tahun 2015, ditetapkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 280 juta wisatawan, yang terdiri dari 265 juta wisatawan nusantara dan 15 juta wisatawan mancanegara. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 2,79% (Periode 2015-2017).

Sementara itu, dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019, ditetapkan target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 48,9 juta wisatawan. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 6% (Periode 2013-2017).

Di Kota Batu, realisasi jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebesar 4,79 juta orang wisatawan, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 10% tiap tahunnya (periode 2013-2017). Jika dibandingkan dengan target jumlah kunjungan wisatawan pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata propinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Kota Batu sebagai Kota Wisata sangat pesat.

Tabel 2.5.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu terhadap Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan Renstra Kementerian Pariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu	Sasaran pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Pariwisata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah kunjungan wisata (juta)	4,79	48,96	280,00

2.4.2. Hasil telaah terhadap RTRW

Fokus pembangunan Kota Batu pada tahun 2017-2022 sesuai dengan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah periode 2010-2030 diarahkan pada perwujudan kawasan pariwisata melalui pengembangan kawasan wisata modern; Pengembangan wisata Desa, Agrowisata, wisata adventure;

Pengembangan even-even wisata; dan Pengembangan obyek wisata unggulan di Kota Batu yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui:

- a. Pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
- b. Penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
- c. Pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. Pengembangan kegiatan penunjang wisata;
- e. Pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
- f. Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. Pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata;
- b. Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
- c. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
- d. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai yang asli dengan pengelolaan yang mengapresiasi nilai tersebut melalui:

- a. Pelestarian kawasan sosial dan budaya;
- b. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;
- c. Peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
- d. Pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah

Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu di sektor pariwisata :

- A. Perwujudan Struktur Ruang
 - a. Perwujudan pusat kegiatan
 - i. Gedung kesenian dan teater di Desa Oro-oro Ombo

- b. Perwujudan Sistem Prasarana
 - i. Pengembangan jalur wisata
 - 1. Jalur mountain bike di Desa Bulukerto-Bumiaji
 - 2. Jalur Cross road/offroad, jalur outbound, dan jalur pendakian gunung di Desa Bumiaji, Songgokerto, Tulungrejo, Pesanggrahan
- B. Perwujudan Pola Ruang
 - a. Perwujudan kawasan lindung
 - i. Konservasi cagar budaya
 - 1. Konservasi bangunan bersejarah di kota dan tempat wisata di pusat kota, Songgoriti, dan Seleka
 - ii. Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam
 - 1. Perancangan ulang Arboretum di Desa Sumberbrantas
 - b. Perwujudan kawasan budidaya
 - i. Pengembangan kawasan hutan produksi
 - 1. pengembangan agroforestry dan ecotourism di Desa Oro-oro Ombo, Desa Tlekung, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto
 - ii. Pengembangan wisata alam, wisata minat khusus dan wisata budaya
 - 1. Pengembangan lokasi obyek wisata kota di desa Oro-oro Ombo
 - 2. Peningkatan prasarana wisata berupa penginapan dan akomodasi
 - 3. Wisata living with people di Bumiaji
 - 4. Wisata adventure di Bumiaji dan Gunung Banyak
 - 5. Pengembangan botanical garden, Great nature of batu, Ecotourism, Agrotourism, memorial resort, sportuorism di Tulungrejo dan Sumber Brantas
 - 6. Kegiatan wisata paralayang di Gunung Banyak
- C. Perwujudan Kawasan Strategis
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - i. Pengembangan kawasan strategis unggulan pariwisata
 - 1. Pengembangan garden stay dengan tema kegiatan wisata living with flowers farmers
 - 2. Pengembangan Wisata adventure dan alam : paralayang dan sirkuit off roads di Gunung Banyak; Kegiatan Camping Ground di obyek wisata Pemandian air Panas Cangar; Rencana kereta gantung dan resort serta cottages
 - 3. Program promosi wisata

4. Pengembangan wisata belanja melalui pembangunan pusat belanja dan kawasan wisata kuliner dan pasar wisata
5. Program pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata: tempat parkir wisata, rest area, pengembangan akomodasi wisata (pasar wisata dan pasar seni yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan Songgokerto)

Dalam upaya pengembangan tersebut yang berkaitan dengan kebijakannya, Dinas Pariwisata Kota Batu berada pada :

- Kebijakan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah melalui sektor pariwisata, dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal; dan pengembangan kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah dari produk lokal.
- Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan desa wisata untuk mendorong kawasan yang belum berkembang potensi ekonominya maupun kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

2.4.3. Hasil telaah terhadap KLHS

Tema dan isu-isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Batu 2017-2022 memiliki fokus pada keberdayaan desa, sehingga terwujudnya Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang memiliki karakter, daya saing dan sejahtera.

Berkaitan dengan tema pariwisata berkelanjutan, maka dihasilkan isu strategis : masih belum efektifnya kolaborasi para pelaku wisata berbasis potensi dan budaya lokal di desa-desa Kota Batu. Untuk menghadapi isu tersebut, maka dirumuskan program prioritas yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan rekomendasi mutu rancangan/materi program/regulasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan investor, calon investor, dan daerah sekitar terutama dengan investor asing
- b. Identifikasi kajian area potensial pariwisata baru terutama pariwisata berbasis alam
- c. Perencanaan manajemen pengelolaan destinasi wisata alam
- d. Penyusunan regulasi mengenai alih fungsi lahan sekaligus pengendalian dan pengawasan destinasi pariwisata

- e. Melakukan kerjasama antar dinas yang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan dan berupaya mencegah terjadinya masalah
- f. Pelaksanaan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keahlian bagi masyarakat
- g. Mengembangkan potensi local wisdom yang dipadukan dengan pola green development untuk pariwisata baru

Tabel 2.8.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Batu

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kemampuan ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas/kegiatan sehingga dapat ditentukan kegiatan yang masih bisa ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau dengan kata lain untuk memastikan suatu kawasan lingkungan masih mampu mendukung kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lain	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Rencana pengembangan kegiatan harus tetap memperhatikan kawasan yang digunakan untuk daerah resapan air, kawasan lindung (tidak adanya alih fungsi lahan) dan tidak menimbulkan pencemaran air didalam pelaksanaannya.
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Prediksi dari dampak suatu kebijakan, rencana atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar.	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Untuk rencana pengembangan kegiatan harus menganalisis tingkat keterlerangan/kemiringan suatu lahan (tanah) karena tingkat kemiringan yang tinggi akan kurang ekonomis dimana untuk melakukan <i>cut and fill</i> memerlukan biaya yang cukup besar dan risiko erosi yang tinggi Rencana pengembangan harus mengacu pada prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi adanya penurunan kualitas lingkungan yaitu polusi tanah, air dan udara akibat limbah kegiatan .
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kemampuan untuk mencapai suatu hasil melalui fungsi ekosistem/layanan meliputi layanan fungsional, layanan regulasi, layanan pendukung kehidupan.	Rencana pola ruang kawasan budidaya	Rencana pengembangan perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan produktif pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan. Dengan adanya regulasi yang tepat maka dapat meminimalisir kawasan terbangun sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada pengendalian banjir maupun erosi.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pendayagunaan sampai tingkat optimal dalam pemanfaatan sumberdaya alam di mana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam dapat tetap dilestarikan.	Rencana pengembangan sektor pariwisata	Untuk pengembangan kawasan wisata yang mengarah pada pembukaan lahan baru guna membangun obyek wisata baru perlu dikaji secara mendalam terkait dengan sumber daya alam (daerah resapan air, polusi tanah, udara dan daya dukung lingkungan lainnya) sehingga obyek wisata yang telah ada dapat dimaksimalkan sarana, prasarana serta pelayanannya.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kondisi lingkungan yang tidak dapat diduga dari kemungkinan dampak perubahan iklim	Rencana pengembangan sektor perumahan	Pembangunan perumahan, real estate maupun hotel harus ada regulasi yang jelas dan pasti karena membuka lahan baru dengan cara menebang hutan dapat berakibat pada perubahan iklim global dan perubahan iklim yang ekstrim yang berdampak pada musim kering berkepanjangan, musim hujan yang semakin tinggi, hujan angin ataupun badai.

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kondisi lingkungan yang cenderung tetap dan dapat diukur dengan indeks keanekaragaman hayati	Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan dan jasa Rencana pengembangan sektor perkantoran Rencana pengembangan sektor perumahan Rencana pengembangan fasilitas pelayan umum Rencana pengembangan sektor pariwisata Rencana pengembangan sektor industri Rencana kawasan strategis Rencana pola ruang kawasan budidaya	Pengelolaan rencana pengembangan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak berakibat berkurangnya hutan lindung yang berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati.

Sumber : Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Batu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kota Batu didasarkan pada berbagai macam isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pariwisata Kota Batu, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Isu strategis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Apabila isu strategis tidak diantisipasi, akan dapat menimbulkan kerugian atau hambatan bagi kinerja Dinas Pariwisata, dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata. Namun sebaliknya apabila isu strategis diantisipasi, maka Dinas Pariwisata dapat menekan faktor penghambat dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, analisis renstra Dinas Pariwisata, analisis renstra Bappeprov Jawa Timur, hasil analisis RTRW Kota Batu, dan hasil analisis KLHS Kota Batu. Identifikasi disajikan dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
<p>Gambaran pelayanan Dinas Pariwisata meliputi :</p> <p>Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan.</p> <p>penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan</p> <p>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	<p>Tersedianya dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2012-2017.</p> <p>Tersedianya dokumen Perencanaan Tahunan</p> <p>Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah.</p> <p>Terselenggaranya peningkatan kualitas aparatur melalui bimtek dan pelatihan</p> <p>Tersedianya dokumen laporan tahunan</p>	<p>Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>Indikator kinerja kunci.</p> <p>Indikator kinerja yang ditetapkan sendiri.</p>	<p>Tingkat kemampuan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam mengerjakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsinya.</p> <p>Koordinasi antar bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>Kemampuan managerial unsur pimpinan Dinas Pariwisata dalam mendelegasikan tugas pekerjaan agar dapat terselesaikan dengan baik.</p> <p>Ketaatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diterima.</p> <p>Tindakan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.</p> <p>Keberadaan data dan informasi yang valid dan terkini.</p> <p>Dukungan kinerja kesekretariatan Dinas Pariwisata.</p>	<p>Dukungan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah terkait pelaksanaan tugas koordinasi dengan SKPD lain.</p> <p>Dukungan DPRD dalam pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan.</p> <p>Dukungan sumber daya penganggaran.</p> <p>Dukungan SKPD lain dalam menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.</p> <p>Dukungan seluruh <i>stakeholder</i> dalam penyelenggaraan perencanaan daerah.</p>	<p>Kurangnya dukungan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam menyelesaikan tugas pekerjaan.</p> <p>Kurangnya etos kerja yang baik dari mayoritas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata.</p> <p>Adanya konflik pribadi dalam Dinas Pariwisata yang cenderung menghambat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata.</p> <p>Kurang valid dan terkininya data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata.</p> <p>Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata.</p> <p>Tidak lancarnya koordinasi antar SKPD.</p> <p>Tidak lancarnya pembahasan-pembahasan dengan DPRD.</p>
<p>Kajian terhadap Renstra Kementerian Pariwisata</p>	<p>Perencanaan pembangunan pariwisata Kota Batu yang sedang dalam upaya untuk benar-benar dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga arah pembangunan pariwisata Kota Batu dapat mendukung capaian</p>	<p>RPJMN tahun 2010-2014.</p> <p>RKP nasional tahun berkenaan.</p> <p>Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019.</p>	<p>Analisis secara mendalam terhadap berbagai substansi perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional.</p> <p>Penetapan berbagai substansi dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat menjabarkan visi dan misi</p>	<p>Evaluasi dari Biro Organisasi Jawa Timur terhadap SAKIP Dinas .</p> <p>Penyebaran rancangan awal perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional maupun dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan, baik melalui media online atau media lain yang efektif.</p>	<p>Kesulitan penetapan indikator kinerja yang baik, yang mungkin disebabkan adanya indikator tingkat nasional yang tidak dapat diterapkan di daerah.</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
	pembangunan secara nasional. Terlaksananya pelibatan seluruh <i>stakeholder</i> Kota Batu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas data dan informasi capaian kinerja dengan cara meningkatkan kualitas evaluasi capaian kinerja.		pembangunan kepariwisataan daerah, dan sekaligus mengakomodir substansi perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional. Kualitas penyelenggaraan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan penyaringan aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Penetapan berbagai indikator kinerja yang harus dilaksanakan dan diukur oleh setiap pejabat di Dinas Pariwisata	Dukungan dan komitmen dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan seluruh SKPD dalam penetapan dan pelaksanaan indikator kinerja dalam rangka mewujudkan data dan informasi capaian kinerja yang valid dan terkini.	
Kajian terhadap Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.	Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Batu dalam upaya sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Batu yang sangat perlu untuk diberdayakan dalam tugas penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Kota Batu belum mengembangkan sistem informasi terkait data dan informasi pariwisata	Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Peraturan perundangan tentang pedoman pengembangan kepariwisataan daerah.	Analisis mendalam terhadap berbagai substansi dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Batu Melaksanakan pendampingan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan melibatkan pihak ketiga yang berkualitas. Mengembangkan sistem informasi data dan informasi capaian kinerja tingkat kota.	Evaluasi dari Biro Organisasi Jawa Timur terhadap SAKIP Dinas . Penyebaran rancangan awal perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional maupun dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan, baik melalui media online atau media lain yang efektif. Penyebaran dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah lain di sekitar Kota Batu melalui media online atau media lain yang efektif.	Belum atau tidak ada dampak nyata peningkatan kemampuan sumber daya aparatur perencana dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan.
Kajian terhadap RTRW.	Telah terbangunnya beberapa sarana prasarana sesuai dengan struktur ruang yang telah ditetapkan.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu	Penetapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang lebih mendetail antara lain RDTRK dan BWK.	Komitmen seluruh <i>stakeholder</i> Kota Batu untuk dapat mentaati RTRW Kota Batu yang telah diperdakan. Koordinasi antar SKPD terkait dalam	Benturan kepentingan dengan pihak ketiga yang terkena dampak dari implementasi RTRW.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Internal (Kewenangan Dinas Pariwisata)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Pariwisata)	
1	2	3	4	5	6
	Telah terbangunnya beberapa sarana prasarana sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan.		Mengeluarkan izin pemanfaatan ruang bagi pihak yang berkepentingan. Penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang.	mengimplementasikan dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang.	Kesulitan dalam mempertahankan rencana tata ruang terkait dengan kawasan tertentu yang berstatus kepemilikan pribadi. Kesulitan dalam menghadapi campur tangan pihak ketiga dalam pembahasan dan penetapan perencanaan tata ruang.
Kajian KLHS meliputi : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Kinerja layanan/jasa ekosistem. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Dimilikinya Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030.	Peraturan perundangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	Pemanfaatan hasil kajian dalam mendasari penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah	Kualitas dan komitmen pihak ketiga yang melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk membuat kajian yang berkualitas. Komitmen dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk berpegang pada hasil kajian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan aspek kajian.	Belum sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan peraturan perundangan tentang KLHS. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen KLHS. Terkesampingkannya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kurangnya kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis baik dalam proses maupun hasil kajiannya.

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan Pelayanan SKPD.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas dan kuantitas wisata yang harus ditingkatkan	Rendahnya kualitas dan kuantitas daya tarik dan usaha jasa pariwisata	Rendahnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata dalam standarisasi Minimnya pemanfaatan potensi lokal dalam pengembangan daya tarik wisata
		Rendahnya daya saing SDM Pariwisata	Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM Pariwisata; Rendahnya kesadaran SDM Pariwisata dalam sertifikasi kompetensinya
		Kurang optimalnya kunjungan wisatawan	Promosi dan kerjasama pariwisata yang belum optimal; Belum tersedianya informasi potensi pariwisata yang akurat dan akuntabel
2	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan harus ditingkatkan	Pelestarian nilai budaya yang masih kurang optimal	Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Daerah
			Belum tersedianya sistem informasi kebudayaan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“ **Desa Berdaya Kota Berjaya** Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra **Agro Wisata Internasional** Yang **Ber karakter, Berdaya Saing** Dan **Sejahtera** ”

Visi Kota Batu Tahun 2018-2022

Untuk menelaah visi Kepala Daerah tersebut terkait dengan pembangunan sektor pariwisata, maka dijabarkan dalam 5 bagian utama, yaitu :

1. **Desa Berdaya Kota Berjaya** : dititikberatkan pada kemandirian dan kemajuan desa
2. **AgroWisata Internasional** : AgroWisata yang dimaksud bukanlah pariwisata berbasis pertanian, melainkan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Dan kata internasional mengacu pada standarisasi kualitas produk pariwisata
3. **Ber karakter** : pembangunan di Kota Batu khususnya sektor pariwisata harus memperhatikan lingkungan dan mempertahankan ciri khas budaya yang ada
4. **Berdaya saing** : pengembangan pariwisata harus didukung dengan SDM Pariwisata yang berkualitas
5. **Sejahtera** : peningkatan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani



Untuk mewujudkan visi kepala daerah tersebut, maka dijabarkan dalam misi Kota Batu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

Dinas Pariwisata mendukung misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas memajukan kebudayaan lokal daerah. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan lokal daerah sebagai bagian dari pelestarian Kebudayaan dalam menjaga identitas unik daerah.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga mendukung misi ketiga, yaitu untuk Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Pariwisata memiliki program prioritas pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus menjaga potensi dan keunikan lokal daerahnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan program prioritas Dinas Pariwisata pada misi pertama.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Isu perubahan iklim menjadi isu seluruh dunia, yang disebabkan dari kelalaian manusia, seperti perubahan alih fungsi lahan, penebangan pohon, eksploitasi air tanah yang berlebihan, hingga pencemaran lingkungan. Suhu udara yang semakin meningkat tiap tahunnya akibat dari efek rumah kaca menjadi menjadi faktor penghambat dalam menjaga pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata yang berhawa sejuk.

Agar kepariwisataan dapat berkelanjutan (Sustainable Tourism) maka untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dibutuhkan langkah-langkah seperti penyadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, pemberian sanksi kepada usaha yang merusak lingkungan, hingga menyusun strategi tanggap bencana lingkungan di berbagai obyek wisata.

3.3.2. Ketersediaan infrastruktur yang belum optimal

Perkembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata sangat pesat, bahkan sering muncul titik-titik kemacetan setiap libur panjang tiba. Hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan wisatawan dalam menikmati pesona Kota Batu. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk merekayasa lalu lintas maupun pembangunan jalur alternatif agar wisatawan semakin nyaman mengunjungi Kota Batu.

3.3.3. Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Masih Belum Optimal

Banyak daerah yang sudah dikenal wisatawan namun tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi wisata. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan tujuan pariwisata Indonesia dan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan sendiri daerahnya dengan bertanggung jawab sebagai daerah destinasi wisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pembangunan pariwisata yang kurang sinergi dengan dokumen RTRW dan KLHS

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang ada di suatu wilayah Kabupaten/Kota, terutama di Kota Batu dimana wilayah yang dapat dikembangkan sangat terbatas. Pengembangan industri pariwisata yang tidak sesuai dengan dokumen RTRW akan menjadi faktor penghambat dan berpotensi untuk menimbulkan konflik antara pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, maka diperlukan penegakan peraturan daerah terkait RTRW. Diantaranya dengan menyusun rencana pengembangan pariwisata yang mengacu pada RTRW, sosialisasi pada pelaku usaha dan masyarakat, hingga pemberian sanksi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menyalahi peraturan terkait RTRW tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaah visi misi Kepala Daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Dinas Pariwisata merumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata belum maksimal dan belum terintegrasi
2. Pengembangan Industri Pariwisata belum maksimal
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata belum optimal
4. Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata yang belum maksimal
5. Pelestarian Kebudayaan yang belum maksimal dan belum terintegrasi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah		Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	85	85	85
1.1		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif (kelompok)	100	110	120	130	140
2	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata		Jumlah PDRB Pariwisata (juta rupiah)	2.970.533	3.178.470	3.400.963	3.639.030	3.893.762
2.1		Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal	Rerata pengeluaran belanja Wisatawan (Rp)	564.740	576.035	587.556	599.307	611.293
2.2			Jumlah Kunjungan Wisatawan (juta orang)	5,26	5,79	6,37	7,01	7,71
2.3			Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan (%)	4,17	12,50	25,00	37,50	50,00

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera		
MISI I	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah	1. Penyusunan Pokok Pikiran Pengembangan Kebudayaan Daerah 2. Event Kebudayaan 3. Pemberdayaan pelaku seni budaya	1.1. Pelestarian Kebudayaan
MISI III	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata	1. Meningkatnya kualitas dan daya Tarik wisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan Desa Wisata 2. Event Pariwisata	1.1. Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata 1.2. Pengembangan SDM Pariwisata 2.1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kegiatan di Dinas Pariwisata periode 2017-2022 difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Desa Wisata. Peran Dinas Pariwisata adalah sebagai pembina. Diantaranya melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dengan mengadakan bimtek dan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pembentukan komunitas masyarakat sadar wisata, pembentukan komunitas masyarakat ekonomi kreatif, dan kampanye sapta pesona.

Selain itu Dinas Pariwisata memfasilitasi pembentukan Desa Wisata dengan membangun sarana prasarana pendukung, memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dengan memanfaatkan dana CSR, menyusun pedoman desa wisata agar pembangunan Desa Wisata sinergi dengan pemanfaatan wilayah Kota dan tidak mengesampingkan pelestarian lingkungan.

Dinas Pariwisata juga berperan dengan mencari pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk desa wisata, disamping juga dengan mendatangkan kunjungan ke Desa Wisata melalui event-event kebudayaan dan pariwisata.

Melalui bidang kebudayaan, Dinas Pariwisata berperan dalam memajukan kebudayaan lokal daerah yang sejalan dengan fokus pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Dengan memanfaatkan nilai tradisi yang ada dan diangkat menjadi event Kota, dan dipadu dengan kreatifitas kelompok kesenian menjadikan keunikan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu. Situs, dan benda purbakala yang ada, memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi Daya Tarik Wisata baru yang sekaligus dapat menambah ketertarikan wisatawan untuk mengenal Kota Batu.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah				Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	85,00	-	Dinas Pariwisata		
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah			Jumlah kelompok seni budaya yang aktif (kelompok)	N/A	100	-	110	-	120	-	130	-	140	-	140,00	-	Dinas Pariwisata		
		2.13	Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya	Persentase Benda, Situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	57,14	57,14	3.048.003.960	57,14	4.340.000.000	57,14	4.855.000.000	57,14	5.980.000.000	57,14	6.180.000.000	57,14	24.403.003.960	Bidang Kebudayaan		
				Persentase seni budaya yang teraktualisasi (%)	0	100		100		100		100		100		100				
		2.13.01	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai tradisional Daerah	Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah (event)	0	3	310.450.000	3	310.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	5	700.000.000	19	2.420.450.000	Seksi Nilai-nilai Tradisional	Kota Batu	
				Jumlah peserta bimtek nilai tradisi (orang);	0	0	-	0	-	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	225	450.000.000			
				Jumlah nilai tradisional yang terdokumentasikan (nilai tradisional)	0	0	-	0	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	300.000.000			
		2.13.02	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Jumlah peserta bimtek pelestarian sejarah dan kepurbakalaan (orang);	0	0	-	50	100.000.000	80	175.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	290	675.000.000	Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan	Kota Batu	
			Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	10	1.000.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	0	11	168.793.000	20	200.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	61	668.793.000		
				Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dimanfaatkan (unit)	0	0	-	0	-	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	10	1.000.000.000		
				Jumlah sejarah lokal daerah yang telah ditetapkan (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000		
		2.13.03	Kegiatan Pelestarian Kesenian Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	0	22	2.538.760.960	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	22	3.700.000.000	110	17.338.760.960	Seksi Kesenian	Kota Batu
				Jumlah aset/benda kesenian yang dikelola (unit)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000		
				Jumlah Kelompok seni yang mendapat pembinaan (kelompok seni)	0	0	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-		
				Jumlah peserta bimtek pelaku seni (orang)	0	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000		
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata				Jumlah PDRB Pariwisata (Juta Rupiah)	2.776.199	2.970.533	-	3.178.470	-	3.400.963	-	3.639.030	-	3.893.762	-	3.893.762	-	Dinas Pariwisata	
Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal				Rerata pengeluaran belanja Wisatawan (Rp)	N/A	564.740	-	576.035	-	587.556	-	599.307	-	611.293	-	611.293	-	Dinas Pariwisata	
				Jumlah Wisatawan (juta orang)	4,79	5,26	-	5,79	-	6,37	-	7,01	-	7,71	-	7,71	-	Dinas Pariwisata	
				Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan (%)	0	4,17	-	12,50	-	25,00	-	37,50	-	50,00	-	50	-	Dinas Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.10	Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata	Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai (%) Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi (%)	0 12,24	4,17 15,31	585.000.000 385.000.000	12,50 18,37	2.110.000.000 510.000.000	25,00 21,43	2.245.000.000 460.000.000	37,50 25,51	2.820.000.000 435.000.000	50,00 29,59	2.410.000.000 435.000.000	50 29,59	10.170.000.000 2.225.000.000	Bidang Pengembangan Produk Pariwisata	
		3.10.01	Kegiatan Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terbangun (unit) Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)	0 0	0 1	580.000.000 5.000.000	2 6	2.030.000.000 80.000.000	32 7	2.200.000.000 45.000.000	56 2	2.720.000.000 100.000.000	48 3	2.360.000.000 50.000.000	138,00 19,00	9.890.000.000 280.000.000	Seksi Obyek & Daya Tarik Pariwisata	Desa Wisata Luar Kota Batu
		3.10.02	Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi persyaratan dasar standarisasi (usaha pariwisata) Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah mendapat pembinaan (pelaku usaha)	12 0	3 100	160.000.000 225.000.000	3 400	60.000.000 450.000.000	3 200	160.000.000 300.000.000	3 300	60.000.000 375.000.000	3 300	60.000.000 375.000.000	27 1300	500.000.000 1.725.000.000	Seksi Usaha Jasa & Sarana Pariwisata	Kota Batu Kota Batu
		3.11	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan	1	2	2.123.925.000	3	3.291.000.000	3	3.666.000.000	3	4.191.000.000	3	4.716.000.000	15	17.987.925.000	Bidang Promosi & Pemasaran Pariwisata	
		3.11.01	Kegiatan Pengembangan Informasi dan Analisa Pasar Pariwisata	Jumlah dokumen analisa data pemasaran pariwisata (dokumen) Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistim Informasi Pariwisata (lembaga)	N/A N/A	0 5	- 116.000.000	3 20	300.000.000 266.000.000	3 20	300.000.000 116.000.000	3 20	300.000.000 116.000.000	3 20	300.000.000 116.000.000	12 80	1.200.000.000 730.000.000	Seksi Informasi & Analisa Pasar	Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata
		3.11.02	Kegiatan pengembangan promosi dan kerjasama bidang	Jumlah hasil kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata (MoU)	N/A	0	-	1	25.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	4	100.000.000	11	250.000.000	Seksi Promosi & Kerjasama	Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			pariwisata	Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	3	6	1.807.925.000	7	2.500.000.000	8	3.000.000.000	9	3.500.000.000	11	4.000.000.000	44	14.807.925.000		Dalam dan luar Kota Batu
				Jumlah media promosi pariwisata (media)	3	6	200.000.000	7	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	34	1.000.000.000		Kota Batu
		3.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	411	60	200.575.000	60	220.000.000	60	240.000.000	60	260.000.000	60	280.000.000	711	1.200.575.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	
				Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan (lembaga)	24	1	1.450.823.000	1	880.000.000	1	1.845.000.000	1	1.025.000.000	1	2.110.000.000	29	7.310.823.000		
		3.12.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata (orang)	40	60	200.575.000	60	220.000.000	60	240.000.000	60	260.000.000	60	280.000.000	340	1.200.575.000	Seksi Bimbingan dan Pelatihan	Kota Batu
		3.12.02	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah kelompok masyarakat pariwisata yang mendapat pembinaan (kelompok)	0	1	1.450.823.000	2	880.000.000	2	1.845.000.000	2	1.025.000.000	2	2.110.000.000	9	7.310.823.000	Seksi Peran Serta Masyarakat	Kota Batu
Meningkatnya kualitas pelayanan dinas				Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		B		B		B		B		B		-	Dinas Pariwisata
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100		100		-	Dinas Pariwisata
		3.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)	100	100	907.093.240	100	997.800.000	100	1.043.100.000	100	1.088.600.000	100	1.133.800.000	100	5.170.393.240	Sekretariat	Dinas Pariwisata
		3.01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbentuk (dokumen)	0	7	15.000.000	6	-	6	-	6	-	6	-	31	15.000.000	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Dinas Pariwisata
				Jumlah dokumen monitoring dan	0	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	20	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perangkat Daerah	evaluasi yang terbentuk (dokumen)															
		3.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen CALK yang terbentuk (dokumen)	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	Sub Bagian Keuangan	Dinas Pariwisata
		3.01.03	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rutin dinas (bulan)	12	12	934.593.240	12	997.800.000	12	1.073.350.000	12	1.088.600.000	12	1.167.075.000	12	5.261.418.240	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
		3.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai dinas (orang/hari)	257	405	40.500.000	405	44.600.000	405	46.600.000	405	48.600.000	405	50.600.000	2282	230.900.000	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
		3.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	10	7	61.711.000	8	65.800.000	8	71.000.000	8	74.100.000	8	77.100.000	49	349.711.000	Subbagian Umum & Kepegawaian	Dinas Pariwisata
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	1	56.800.000	1	62.500.000	1	65.300.000	1	68.200.000	1	71.000.000	7	323.800.000		
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	0	14	114.464.000	14	125.900.000	14	131.600.000	14	137.400.000	14	143.100.000	70	652.464.000		
				Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000	1	62.500.000	6	285.000.000		
			JUMLAH				9.066.395.200		12.702.600.000		14.756.350.000		16.187.900.000		17.702.375.000		72.089.407.480		

Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu

Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630928 199503 1 001

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari (%)	85	85	85	85	85	85	85
2	Jumlah PDRB Pariwisata (juta rupiah)	2.776.199	2.970.533	3.178.470	3.400.963	3.639.030	3.893.762	3.893.762

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah sesuai format yang di sosialisasikan Bappelitbangda Kota Batu sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategik Satuan Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu 2017-2022 disusun hanya sampai dengan Perancangan Program. Sedangkan implementasi masing-masing program berupa kegiatan akan disusun setiap tahun dalam format Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) Dinas Parwisata Kota Batu.

Dengan tersusunnya Rencana Strategik ini, maka masing-masing bidang dan bagian Tata Usaha unit kerja Dinas Pariwisata Kota Batu telah memiliki pedoman dan arah bagi pengembangan maupun pembangunan pariwisata Kota Batu dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2017-2022.